

## PSI: Belum Ada Informasi Kaesang Maju Jadi Cagub di Pilgub DKI Jakarta

JAKARTA (IM) - Ketua Desk PSI Jakarta Justin Adrian Untayana mengaku belum menerima informasi dari Dewan Pimpinan Pusat PSI (DPP PSI) berkait kabar Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, maju sebagai bakal calon wakil gubernur (bacawagub) di pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta.

Hal itu diungkapkan Justin setelah munculnya foto Kaesang bersanding dengan keponakan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Budisatrio Djiwandono. Budi saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR.

"Ini hal yang saya sama sekali saya belum menerima informasinya dari pusat, dari DPP. Tapi saya sangat menghargai posting-an tersebut," ujar Justin saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (30/5).

Untuk diketahui, foto duet Budisatrio dan Kaesang diunggah Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sufmi Dasco melalui akun Instagram-nya. Justin mengaku belum mengetahui maksud unggahan tersebut. Namun, dia berpendapat bahwa Sufmi

mencoba memberikan warna dalam Pilkada 2024.

"Saya kira Abang Sufmi Dasco sudah memberikan, mewarnai, meramaikan suasana pemilihan gubernur Jakarta yang seperti ini selama ini adem ayem saja, kan," katanya.

Sejauh ini, Justin memastikan Dewan Penguas Wilayah (DPW) DKI Jakarta belum menerima informasi apapun berkait poster duet Budisatrio x Kaesang tersebut.

"Jadi saya kira hal ini walaupun saya belum menerima informasinya dari DPP terkait hal ini, sama sekali belum, belum ada arahan juga terkait ini," paparnya.

Saat ini, Justin mengaku masih diminta untuk tetap fokus pada tugasnya di penjurangan bacawagub dan bacawagub PSI sampai akhir Juli 2024.

Foto-foto Budi Bersama Kaesang pertama kali muncul melalui unggahan media sosial Instagram Dasco, @sufmi\_dasco. Dalam poster yang diunggah Dasco tercantum bahwa Budi sebagai cagub DKI Jakarta dan Kaesang sebagai wakil gubernurnya. ● me

## Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

JAKARTA (IM) - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengklaim Dewan Media Sosial bisa menjadi forum literasi digital bagi masyarakat Indonesia.

"Dewan Media Sosial ini bisa jadi satu forum yang membantu satu literasi digital," kata Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria di Jakarta, Jumat (31/5), dikutip dari Antara.

Dewan Media Sosial diwacanakan sebagai lembaga yang menangani disinformasi dan misinformasi serta merekomendasikan pengelola media sosial menghilangkan konten-konten yang mengandung informasi salah. Dewan Media Sosial juga bisa menjalankan fungsi edukasi untuk meningkatkan literasi digital masyarakat.

Nezar mengatakan bahwa pembentukan Dewan Media Sosial sebenarnya telah menjadi pembahasan negara-negara di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, Irlandia sudah membentuk badan serupa. Di Indonesia, usul pembentukan Dewan Media Sosial awalnya diajukan oleh satu kelompok

masyarakat sipil. Kemenkominfo kemudian menanggapinya usul tersebut.

Nezar mengemukakan bahwa DMS bisa berbentuk lembaga independen, yang dapat menyampaikan rekomendasi-rekomendasi tentang konten media sosial tetapi tidak punya kewenangan untuk menutup akses atau mencabut konten.

"Nantinya, mereka bersama-sama merumuskan bagaimana mengatur lalu lintas informasi di media sosial agar comply dengan standar-standar etik, paling enggak gitu. Jadi, tidak punya wewenang langsung untuk menutup, memblokir, atau segala macam," ujar Nezar.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Budi Arie Setiadi sebelumnya menjelaskan, pemerintah saat ini masih menimbang dan menerima masukan terkait wacana pembentukan Dewan Media Sosial.

"Jika memang terbentuk, maka DMS ditujukan untuk turut memastikan dan mengawal kualitas tata kelola media sosial di Indonesia yang lebih akuntabel," katanya, diberitakan Antara, Selasa (28/5) lalu. ● me

## Fraksi PDI-P Usul Pasal TNI Bisa Pensiun Usia 65 Tahun Dikaji Ulang

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-P TB Hasanuddin menilai, usulan untuk memperpanjang masa pensiun prajurit TNI di dalam rencana revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dikaji ulang.

"Perihal revisi pasal 53 ayat 2, untuk jabatan fungsional sampai usia 65 tahun sebaiknya dipertimbangkan ulang," ujar TB Hasanuddin, Minggu (2/6).

Di dalam draf RUU 34/2004, disebutkan bahwa prajurit TNI yang menduduki jabatan fungsional bisa diperpanjang masa pensiunnya hingga 65 tahun. Kalaupun ingin diperpanjang, sebaiknya prajurit tersebut bukan ditugaskan menjadi prajurit TNI, tetapi dialihkan untuk mengisi jabatan sipil.

Misalnya, sebagai pengajar di perguruan tinggi atau peneliti utama di lembaga tertentu.

"Bila tenaga prajurit ini masih dibutuhkan, sebaiknya dialihfungsikan menjadi aparatur sipil negara,"

pungkas TB Hasanuddin.

Diberitakan sebelumnya, draf terbaru revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) memperpanjang usia pensiun perwira dari semula 58 tahun menjadi 60 tahun.

Dalam draf yang diterima wartawan, bunyi Pasal 53 Ayat (1) UU TNI akan diubah sebagai berikut, "prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 60 tahun bagi perwira dan paling tinggi 58 tahun bagi bintangara dan tamtama".

Kemudian, pada Ayat (2), khusus jabatan fungsional, prajurit dapat melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 65 tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. RUU TNI juga mengakomodasi perpanjangan masa dinas sebanyak dua kali bagi perwira tinggi (pati) bintang empat.

"Khusus untuk perwira tinggi bintang 4, prajurit dapat diperpanjang masa dinas keprajuritan maksimal dua kali yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden," bunyi Ayat (3).

Adapun perpanjangan masa dinas keprajuritan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berlaku paling lama dua tahun dan/atau dapat diperpanjang kembali sesuai dengan persetujuan presiden.

Ketentuan lebih lanjut mengenai masa dinas keprajuritan akan diatur dengan peraturan pemerintah. ● han

# 2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



## Menko Hadi Tjahjanto Sosok yang Tepat Sebagai Ketua Satgas Berantas Judi Online

Satgas diharapkan menindak tegas para pelaku penyedia judi online, sehingga judi online tersebut diberantas hingga ke akarnya.

JAKARTA (IM) - Direktur Eksekutif Indonesian Bureau of Service Watch (IBSW), sebuah Lembaga Pemantau Birokrasi & Pelayanan Publik Indonesia, Nova Andika, menilai langkah Presiden Jokowi sangat tepat menunjuk Menko Polhukam Hadi Tjahjanto sebagai panglima perang terhadap judi online.

Track record Menko Hadi Tjahjanto tidak diragukan lagi kepaiwaiannya dalam menangani berbagai kasus besar, dan berbagai amanah yang diembankan kepadanya selama ini.

"Dengan dibentuknya Satgas Pemberantasan Judi Online oleh Presiden maka dapat dikatakan bahwa

Pemerintah dengan serius berkomitmen dan mengawal pemberantasan judi online yang sangat meresahkan dan berdampak buruk bagi masyarakat luas," kata Nova, dikutip Minggu (2/6).

Jika sebelumnya Menkominfo yang melakukan penanganan judi online, dengan men-take down jutaan konten judi online dan upaya-upaya lainnya. Maka dengan dibentuknya Satgas yang di ketuai oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, pemberantasan judi online dapat dilakukan akan lebih optimal.

"Praktik judi online secara menyeluruh dapat diberantas, dengan dilakukan berbagai upaya hingga mewujudkan bukti nyata, di bawah Kasat-

gas Menko Hadi," tuturnya.

Nova berharap dengan adanya satgas ini, bukan hanya situs judi online dan juga konten digital yang mengandung unsur perjudian yang diberantas, tetapi juga agar Satgas dapat menindak tegas para pelaku penyedia judi online tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga judi online tersebut diberantas hingga ke akarnya.

"Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 jo. Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024. Juga diatur pula dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang masih berlaku, serta Pasal 426 dan Pasal 427 UU 1/2023 tentang KUHP Baru yang akan berlaku tahun 2026, yaitu 3 tahun sejak diundangkan. Maka, penetapan hukum yang tegas dalam pemberantasan judi online harus dilakukan, pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menggelar

rapat internal bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/5). Yang mana hasil dari rapat tersebut

### BALI FILM FORUM

Produser Starvision Plus Reza Servia (kanan) menyampaikan pandangannya bersama moderator Tantowi Yahya (kiri) saat kegiatan Bali Film Forum di kawasan Sanur, Denpasar, Bali, Minggu (2/6). Forum yang menjadi rangkaian kegiatan Bali International Film Festival (Balinale) 2024 itu diselenggarakan untuk mendiskusikan berbagai topik terkait industri perfilman dengan berbagai potensi dan perkembangannya.

## Prabowo: TNI Siap Dikirim Jadi Pasukan Perdamaian ke Gaza

JAKARTA (IM) - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyatakan RI akan terus berupaya memberikan bantuan ke Gaza dan jika diperlukan dan diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian. Kapuspen TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar merespons hal tersebut.

"TNI siap melaksanakan operasi perdamaian di bawah bendera PBB," kata Nugraha saat dihubungi wartawan, Minggu (2/6).

Nugraha mengatakan TNI siap ke mana pun jika sudah diperintah negara. Hal ini sudah diamanatkan pada alinea ke-4 pembukaan UUD '45.

"Ke mana pun jika sudah menjadi perintah negara karena hal ini sudah diamanatkan pada alinea ke-4 pembukaan UUD'45," ucapnya.

Nugraha mengatakan perintah negara menjadi kehormatan bagi TNI. TNI siap menurunkan personel untuk bertugas di mana dan ke mana saja sesuai arahan negara.

"TNI bertugas atas dasar perintah, bagi TNI tugas adalah kehormatan, jadi kalau negara memerintahkan, TNI siap bertugas di mana saja dan

sepakat untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online. Satgas tersebut diketuai Menko Polhukam Hadi Tjahjanto. ● mar

ke mana saja," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto tampil sebagai pembicara dalam sesi Special Address pada forum The International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2024. Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti sejumlah isu strategis keamanan global yang menjadi perhatian dunia saat ini.

"Bagi Indonesia, menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan adalah landasan utama dalam keterlibatan internasional kami. Kami yakin bahwa hanya melalui dialog dan kerja sama, kita dapat mencapai tujuan tersebut," ujar Prabowo dalam forum IISS di Hotel Shangri-La, Singapura, Sabtu (1/6).

Menurut Prabowo, kolaborasi adalah satu-satunya cara untuk mencapai kesejahteraan dan harmoni. Indonesia berkomitmen kuat untuk memperdalam dialog inklusif dan kerja sama konkret, serta menjunjung tinggi hukum internasional, terutama menghormati kedaulatan nasional semua negara dan integritas teritorial sebagaimana diamanatkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. ● me

## Kejaksan Agung Tak Dapat Disalahkan Jika Nilai Aset Koruptor Turun Saat Dilelang

JAKARTA (IM) - Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad, mengatakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak dapat disalahkan terkait penurunan nilai aset korupsi saat dilelang. Serbab Kejagung dalam hal ini hanya melaksanakan perintah pengadilan untuk menyerahkan aset yang disita kepada Kementerian Keuangan untuk dilelang.

Suparji mengungkapkan hal ini sebagai respon atas kritik yang dilontarkan Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSSST), yang mempersoalkan penurunan nilai aset saat dilelang dibandingkan dengan perkiraan awal dalam kasus pelelangan aset terpidana korupsi Jiwarsaya, Heru Hidayat.

Seperti diketahui, putusan pengadilan menghukum Heru untuk membayar kerugian negara sebesar Rp10,72 triliun, namun aset yang dilelang hanya menghasilkan Rp2,9 triliun.

"Tanggung jawab lelang ya ada di Kementerian Keuangan, dan kejaksaan tidak bisa dipisahkan karena dia hanya menjalankan keputusan di pengadilan," kata Suparji dalam keterangannya kepada wartawan, dikutip Minggu (2/6).

Suparji menyakini, Kejagung bertindak berdasarkan

## MA Persilakan KY Dalam Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

JAKARTA (IM) - Mahkamah Agung (MA) mempersilakan bila Komisi Yudisial (KY) hendak mendalami putusan lembaganya perihal perubahan minimal batas usia calon kepala daerah.

"Ya, silakan kalau KY," kata Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Sunarto di Gedung MA, Jakarta, Sabtu (1/6), melansir Antara.

Ia pun enggan mengomentari langkah yang hendak dilakukan KY. Namun, ia menegaskan bahwa hakim memiliki otoritas di dalam mengambil keputusan.

"Karena prinsipnya hakim itu punya otoritas, (tetapi) kalau yang itu saya tidak ada komentar," jelasnya.

Sebelumnya, Anggota KY Joko Sasmito mengatakan, KY telah menginstruksikan Tim Pengawasan Perilaku Hakim (Waskim) dan Investigasi untuk mendalami putusan MA tentang perubahan minimal batas usia calon kepala daerah. Pendalaman ini akan menjadi

dasar bagi KY untuk melakukan pertimbangan hukum terhadap majelis hakim MA yang memutus perkara itu.

Lebih lanjut, anggota sekaligus Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata mengemukakan bahwa lembaganya tetap menaruh perhatian atas putusan tersebut meskipun tidak berwenang untuk mengintervensi.

"KY menaruh concern atas putusan ini karena putusan ini juga menentukan pilkada yang jujur dan adil, yaitu soal uji materi terhadap peraturan KPU yang memang menjadi kewenangan Mahkamah Agung," katanya.

Mukti menilai hakim seharusnya perlu menjaga rasa keadilan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap putusan tersebut, sekaligus untuk pelaksanaan demokrasi yang lebih baik. Ia kemudian mempersilakan publik untuk melapor apabila menemukan dugaan pelanggaran kode etik



### AKSI BELA PALESTINA DI BATANG

Sejumlah orang mengikuti aksi bela Palestina di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Minggu (2/6). Aksi bela Palestina yang diikuti berbagai elemen warga dengan kirab dan pengumpulan donasi itu sebagai bentuk wujud kepedulian terhadap Palestina atas serangan dan kejahatan Israel.

**PENGUMUMAN**  
Bersama ini kami umumkan bahwa para pemegang saham PT BERKAH SARANA BERKARYA, berkedudukan di Jakarta Timur ("Perseroan") akan mengalihkan saham mayoritas kepada Pihak Ketiga. Sebagai hasil dari pengalihan saham tersebut, maka akan terjadi perubahan pengendalian di Perseroan.  
Pengumuman ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun tentang Perseroan Terbatas.  
Jakarta, 03 Juni 2024  
DIREKSI  
PT BERKAH SARANA BERKARYA